

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI
KANTOR BUPATI PESISIR SELATAN**

ARTIKEL

Di ajukan sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



OLEH

SURYA ABADI

1510012111244

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

No.Reg : 10/Skipsi/HTN/FH/II-2022

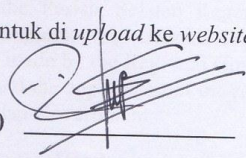
PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg No : 10/Skripsi/HTN/FH/II-2022

Nama : Surya Abadi
NPM : 1510012111244
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan
Dinas Di Kantor Bupati Pesisir Selatan

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing)

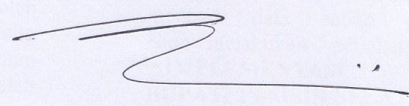


**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI KANTOR
BUPATI PESISIR SELATAN**

Surya Abadi¹, Sanidjar Pebrihariati R¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

Email : suryaabadii201@gmail.com

ABSTRACT

Official travel is a trip carried out by an employee or employee of an agency related to official travel assignments. The formulation of the problem in this study: 1). How is the Implementation of the Pesisir Selatan Regent Regulation Number 2 of 2020 concerning the System and Procedure for the Implementation of Official Travel in the Pesisir Selatan Government. 2). What are the obstacles faced by the Pesisir Selatan Regency Government in implementing the Pesisir Selatan Regent's Regulation Number 2 of 2020 concerning Systems and Procedures for Implementing Official Travel within the Pesisir Selatan Regency Government. 3). To analyze the efforts made by the Regional Government of the Pesisir Selatan Regency Government in overcoming obstacles and the application of the regulation of the Pesisir Selatan Regent Number 2 of 2020 within the Pesisir Selatan Government.

.Keyword: Regional Regulations, Traditional Markets, Street Vendors.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi adalah kegiatan yang di lakukan dengan perencanaan dan mengacu ke pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang di laksanakan oleh karyawan atau pegawai suatu instansi yang berkaitan dengan tugas perjalanan kedinasan. Tugas Perjalanan Dinas adalah tugas yang berkaitan dengan kepentingan Lembaga Instansi yang bersangkutan seperti seminar, diklat, penjajakan kerja sama, menghadiri acara seremonial, kegiatan sosial dan lain-lain Dokumen yang harus di wajibkan pada saat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Surat Perintah Tugas (SPT), surat undangan, di sposisi dan bukti kas keluar. Pelaksana Perjalanan Dinas dapat di laksanakan apabila bagian sekretariat sudah menerima undangan dan surat masuk, lalu membuat lembar disposisi. Dalam Perjalanan Dinas di kenal adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD merupakan suatu aktivitas yang sering di lakukan di Instansi Pemerintah atau Swasta. SPPD

merupakan surat pengantar yang dibuat ketika pegawainya akan melakukan perjalanan dinas ke kota tertentu. Penelitian terkait pembuatan system SPPD di Instansi Pemerintah di antaranya adalah Pengembangan Aplikasi SPPD di Dinas di Badan Koordinasi Pemerintahan dan harus mencari data setiap pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas. judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI KANTOR BUPATI PESISIR SELATAN ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Pesisir Selatan ?
2. Apa sajakah Kendala – kendala yang di hadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penerapan Peraturan Bupati PesisirSelatan Nomor

2 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ?

3. Bagaimanakah Upaya-Upaya Yang di Lakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi Kendala dan penerapan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Pesisir Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Pesisir Selatan Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan ?

2. Untuk menganalisa Kendala – kendala yang di hadapi Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penerapan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ?

3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang di lakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Pemerintah Pesisir Selatan dalam mengatasi Kendala dan penerapan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Pesisir Selatan ?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung dari lapangan, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Serta analisa data

menggunakan metode analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Kantor Bupati Pesisir Selatan

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan khusus nya pada bagian umum kantor Bupati Pesisir Selatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas asisten administrasi umum dalam perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang umum.

Adapun fungsi bagian umum pada kantor Bupati adalah pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati, pelayanan penerimaan kunjungan tamu dan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi pemberian informasi, menyiapkan tempat, dan penyediaan jamuan, pelaksanaan pemeliharaan dan kebersihan di lingkungan kantor Bupati, pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional jabatan Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli Bupati, dan kendaraan dinas operasional pool, pelaksanaan urusan perlengkapan, pelaksanaan inventarisasi barang pada bagian umum, dan pelayanan administrasi dan operasional Bupati, Wakil Bupati dan Staf Ahli Bupati.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Joko Setia Budi sebagai kepala bidang bagian umum pemeritahan di kantor Bupati Pesisir Selatan Penerapan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Perjalanan Dinas Di Kantor Bupati Pesisir Selatan.

B. Kendala – kendala Yang Di Hadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Penerapan Peraturan Bupati Pesisir Selatan

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Kantor Bupati Pesisir Selatan.

1. Kerusakan pada alat transportasi :
Pada permasalahan ini kami akan mengupayakan atau meningkatkan tingkat kemutuhan kendaraan dinas yang di gunakan untuk melakukan tugas perjalanan dinas. Seperti pengecekan kendaraan lebih memerhatikan dan merawat mobil yang di pergunakan untuk melakukan perjalanan dinas tersebut, agar kendala seperti ini tidak terjadi lagi.
2. Terputus nya akses perjalanan :
Pada permasalahan kali ini kami akan lebih memerhatikan dan mewaspadai beberapa daerah rawan titik longsor yang ada di daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Dan kami akan mengupayakan agar daerah – daerah yang rawan akan titik longsor akan menjadi lebih aman, agar kejadian seperti ini tidak akan menghambat kami dalam melakukan tugas perjalanan dinas.
3. Kendala dari dalam :
Kendala dari dalam yang biasa nya sering terjadi sakit dan kemalangan lainya dari pegawai yang akan melakukan tugas perjalanan dinas.
Untuk kendala dari dalam lainya untuk tugas perjalanan dinas kami sudah dapat mengatasi dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020.

C. Upaya Yang Di Lakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Mengatasi Kendala Dan Penerapan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Di Lingkungan Pemerintah Pesisir Selatan.

1. penggantian riil biaya moda transportasi darat, dan atau laut, dan atau udara untuk pergerakan fisik antar daerah di hitung dari tempat atau lokasi ke berangkatan dengan tempat atau lokasi tujuan.
2. untuk pergantian biaya riil moda transportasi udara dapat memperhitungkan fasilitas biaya bagasi (flight facilities/ service fee) maksimal 10 kg bagi maskapai penerbangan yang mempersyaratkan biaya bagasi dan dapat di perhitungkan dalam rincian perjalanan dinas jika tercantum dalam tiket penerbangan atau bukti sah lainnya yang di keluar kan oleh maskapai penerbangan.
3. untuk maskapai penerbangan yang masih memberikan fasilitas bagasi (flight facilities/ service fee) secara gratis maka kelebihan biaya tidak di perkenakan atau di perhitungkan dalam rincian perjalanan dinas.
4. dalam hal biaya bagasi (flight facilities/ service fee) yang melebihi ketentuan sebagaimana di maksud pada huruf b maka kelebihan atas biaya bagasi tidak dapat di perhitungkan/ di bayar kan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan sebagian tugas asisten administrasi umum dalam perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang umum.
 - b. Dalam penerapan peraturan bupati Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas

- justri tidak ditemui kendala, karna peraturan tersebut memuat standar operasional (SOP) dalam menjalankan perjalanan dinas.
2. Kendala – kendala yang di hadapi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penerapan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang sistem dan prosedur Pelaksanaan Perjalanan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :
 - A. Beberapa kendala yang timbul dari luar antara lain :
 - a). kerusakan alat transportasi
 - b). terputus nya akses perjalanan
 - B. Beberapa kendala yang timbul dari dalam antara lain :
 - a). uang harian
 - b). biaya transport
 - c). biaya penginapan
 3. Upaya – upaya yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala dalam penerapan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2020 di lingkungan Pesisir Selatan ?
 - a. Pengantian riil biaya moda transportasi darat, dan laut atau udara untuk pergerakan fisik antar daerah di hitung dari tempat atau lokasi tujuan.
 - b. Uang harian di bayarkan secara lumpsun dan secara sekaligus.

B. Saran

- a. Agar Kabupaten Pesisir Selatan harus lebih meningkatkan kinerja nya dalam mengatasi Kendala – kendala yang timbul seperti ada kejadian alam yang membuat sistem dan prosedur menjadi terkendala semisal longsor, banjir, dan lainnya.
- b. Agar Kabupaten Pesisir Selatan

- menimbang kembali agar pelaksanaan perjalanan dinas Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan lebih efisien maka di pandang untuk meningkatkan sistem dan prosedur perjalanan dinas di Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pemerintah daerah lebih banyak sharing dan melihat bagaimana cara agar pengimplementasian Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tersampaikan dan di ketahui oleh seluruh pegawai dan masyarakat agar mereka dapat mengerti dan ingin berpartisipasi di dalam nya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Sistem Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pesisir Selatan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak. Dengan selesainya artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta membantu penulis dalam menyelesaikan executive summary ini dengan baik.